



*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 95 TAHUN 2021

TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah;
- b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bersama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, telah meneliti, menyusun dan membahas terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD, dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Memperhatikan: Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tanggal 15 November 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2022.

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Sebanyak 26 (dua puluh enam) rancangan Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Apabila dalam tahun berjalan terdapat Rancangan Peraturan Daerah yang bersifat mendesak/darurat atas usulan Legislatif maupun Eksekutif yang tidak tercantum dalam lampiran Keputusan ini, maka Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat dibahas tanpa harus melakukan perubahan/penambahan terhadap Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KETUA

H. PRASETIO EDI MARSUDI, SH

Tembusan :

1. Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
2. Para Ketua Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta
3. Para Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

NOMOR : 95 Tahun 2021
TANGGAL : 23 November 2021

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
T A H U N 2 0 2 2

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT / INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERUBAHAN		NASKAH AKADEMIS	PENJELASAN/ KETERANGAN			
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10
1	Peraturan Daerah	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	Pertanggungjawaban Pelaksanaan alokasi program dan penganggaran Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021	√	-	UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	-	√	Bappeda, BPKD, Biro Hukum, Biro KDH, Setwan, DPRD, Kemendagri	Triwulan I	
2	Peraturan Daerah	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Perubahan alokasi program dan penganggaran kegiatan tahun 2022	-	√	UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	-	√	Bappeda, BPKD, Biro Hukum, Biro KDH, Setwan, DPRD, Kemendagri	Triwulan III	
3	Peraturan Daerah	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Alokasi program dan penganggaran kegiatan tahun 2023	√	-	UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	-	√	Bappeda, BPKD, Biro Hukum, Biro KDH, Setwan, DPRD, Kemendagri	Triwulan IV	
4	Peraturan Daerah	Kawasan Tanpa Rokok	Pengaturan kawasan tanpa rokok, hak dan kewajiban, penandaan, pembinaan dan pengawasan, peran masyarakat dan sanksi	√	-	UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	√	-	Dinas Kesehatan, Biro Kesejahteraan Sosial	Triwulan III	

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT / INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERUBAHAN		NASKAH AKADEMIS	PENJELASAN / KETERANGAN			
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10
5	Peraturan Daerah	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (<i>Corporate Social Responsibility / CSR</i>)	Pengaturan ruang lingkup dan asas penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, maksud dan tujuan, prinsip dan pedoman, program TJSLP/CSR, kelembagaan, pembiayaan, penghargaan dan sanksi	√	-	UU No 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara kesatuan Republik Indonesia	√	-	Bappeda	Triwulan III	
6	Peraturan Daerah	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan	Pengaturan kewenangan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan pendidikan, jaminan ketersediaan daya tampung tiap jenjang pendidikan, pemerataan pendidikan antar wilayah melalui Zona Layanan Satuan Pendidikan (ZLSP), pencapaian standar layanan mutu pendidikan (mutu pendidikan, akreditasi, peningkatan kualitas guru), pembiayaan (pemberian subsidi bagi siswa yang tidak mampu baik di sekolah negeri ataupun swasta, pemungutan biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga yang mampu di sekolah negeri	√	-	UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	√	-	Dinas Pendidikan, Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	Triwulan I	

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT / INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERUBAHAN		NASKAH AKADEMIS	PENJELASAN/ KETERANGAN			
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10
7	Peraturan Daerah	Jaringan Utilitas	Pengaturan penataan ruang melalui prioritas sarana utilitas yang holistik dan mencerminkan sinergitas, harmonisasi dan keterpaduan pelaksanaan jaringan utilitas	√	-	UU No. 26 Tahun 2017 tentang Penataan Ruang	√	-	Dinas Bina Marga	Triwulan I	
8	Peraturan Daerah	Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Perumusan tugas dan kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai pelaksana amanat UU Nomor 8 tahun 2011, penambahan 17 sektor penting dalam aspek kehidupan bagi penyandang disabilitas, pembentukan kelembagaan Dewan Disabilitas Jakarta, bentuk dan prosedur pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas	-	√	UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	√	-	Dinas Sosial, Biro Kesejahteraan Sosial	Triwulan I	

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT / INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERUBAHAN		NASKAH AKADEMIS	PENJELASAN/ KETERANGAN			
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10
9	Peraturan Daerah	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022	Sehubungan dengan bencana pandemi Covid-19 yang berdampak besar terhadap perlambatan perekonomian sekaligus kinerja keuangan dan kinerja pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, dan tindak lanjut Pasal 342 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yakni perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan mendasar yaitu bencana, krisis ekonomi atau perubahan kebijakan nasional	-	√	UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	-	√	Bappeda dan seluruh Perangkat Daerah di Provinsi DKI Jakarta	Triwulan I	
10	Peraturan Daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengaturan pengelolaan keuangan daerah, APBD, Penyusunan rancangan dan penetapan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan laporan, penyusunan rancangan pertanggungjawaban APBD, Kekayaan Daerah dan Hutang Daerah, BLUD, Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah, informasi keuangan daerah, pembinaan dan pengawasan	-	√	UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	√	-	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Triwulan II	

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT / INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERUBAHAN		NASKAH AKADEMIS	PENJELASAN/ KETERANGAN			
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10
11	Peraturan Daerah	Rencana Pembangunan Industri Provinsi 2021-2041	Perencanaan industri yang mandiri, berdaya saing, maju, industri hijau, berbasis teknologi informasi (digital) untuk jangka 20 (dua puluh) tahun mendatang	√	-	UU No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	√	-	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM, Biro Perekonomian dan Keuangan	Triwulan II	
12	Peraturan Daerah	Rencana Tata Ruang Wilayah 2030	Mengatur tata ruang wilayah provinsi yang memuat perencanaan (struktur dan pola ruang), pemanfaatan dan pengendalian tata ruang daerah	-	√	UU No. 26 Tahun 2017 tentang Penataan Ruang	√	-	Bappeda, DKPKP, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	Triwulan II	
13	Peraturan Daerah	Kemudahan Berusaha	Perubahan atas 7 (tujuh) Peraturan Daerah terkait perizinan berusaha di bidang transportasi, perdagangan, ketenagakerjaan, pariwisata, bangunan gedung untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja sekaligus mencabut 2 (dua) peraturan daerah mengenai penyelenggaraan perizinan serta peraturan zonasi	-	√	Delegasi Undang-Undang Cipta Kerja	-	√	Dinas Perhubungan, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, DPMPSTP, Biro Perekonomian dan Keuangan	Triwulan II	

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT / INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERUBAHAN		NASKAH AKADEMIS	PENJELASAN/ KETERANGAN			
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10
14	Peraturan Daerah	Penyelenggaraan Sistem Pangan	Menjamin ketersediaan pangan yang cukup dan aman, menjamin stabilitas ketersediaan pangan pokok dan strategis/penting, memastikan kelancaran logistik dan distribusi pangan, menciptakan kondisi kondusif bagi usaha dalam alur sistem pangan/rantai pasok agribisnis pangan, kemudahan akses bagi kelompok rawan/rentan pangan dan gizi, mendorong terpenuhinya kecukupan gizi perseorangan/masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, dan pengaturan tentang dana abadi pangan	√	-	UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	√	-	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Triwulan II	

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT / INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERUBAHAN		NASKAH AKADEMIS	PENJELASAN/ KETERANGAN			
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10
15	Peraturan Daerah	Rencana Umum Energi Daerah Provinsi DKI Jakarta	RUED Provinsi DKI Jakarta disusun tahun 2019-2050 merupakan rujukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dan penyusunan APBD serta pelaksanaannya. RUED berfungsi sebagai pedoman bagi SKPD untuk menyusun dokumen rencana strategis dan pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan koordinasi perencanaan dan pembangunan energi lintas sektor dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah bidang energi	√		UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	√	-	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	Triwulan II	
16	Peraturan Daerah	Jalan Berbayar Elektronik	Tarif layanan, pembangunan sarana Jalan berbayar elektronik, teknologi jalan berbayar elektronik, mekanisme sistem berbayar elektronik, pengawasan dan pengendalian	√	-	UU No 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara kesatuan Republik Indonesia	√	-	Dinas Perhubungan	Triwulan II	

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT / INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERUBAHAN		NASKAH AKADEMIS	PENJELASAN / KETERANGAN			
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10
17	Peraturan Daerah	Rencana Induk Transportasi Jakarta	Penataan kembali sistem transportasi guna menunjang dan menggerakkan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat terhadap sistem transportasi Jakarta sebagai bagian dari sistem transportasi nasional mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan sistem Transportasi yang handal sesuai dengan kedudukan dan kewenangan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara serta melaksanakan Amanat Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi	√	-	1. Prioritas Gubernur 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan RI 3. Amanat Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi	√	-	Dinas Perhubungan	Triwulan I	
18	Peraturan Daerah	Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang demokratis, dimana memberikan jaminan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pembentukan peraturan perundang-undangan, penganggaran, dan pengambilan kebijakan publik	√	-	UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	√	-	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk	Triwulan IV	

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT / INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERUBAHAN		NASKAH AKADEMIS	PENJELASAN/ KETERANGAN			
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10
19	Peraturan Daerah	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Menyesuaikan dengan Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sehingga dilakukan perubahan terhadap Pasal 5 ayat (3) terkait penentuan dasar pengenaan apabila nilai perolehan objek pajak (NPOP) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan	-	√	UU Nomor 28 Tahun 2009	-	√	Badan Pendapatan Daerah	Triwulan III	
20	Peraturan Daerah	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah)	Penambahan ketentuan pembentukan badan usaha untuk menerima dan mengelola <i>Participating Interest</i> 10 % (sepuluh persen) penambahan modal berupa imbreng tanah di kawasan olah raga terpadu	-	√	UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	-	√	BPBUMD, Biro Perekonomian dan Keuangan	Triwulan I	
21	Peraturan Daerah	Perseroan Terbatas Transjakarta (Perseroan Daerah)	Penyesuaian Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah	√	-	UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	√	-	BPBUMD, Biro Perekonomian dan Keuangan	Triwulan II	
22	Peraturan Daerah	Perseroan Terbatas Food Station Tjipinangn Jaya (Perseroan Daerah)	Penyesuaian Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah	√	-	UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	√	-	BPBUMD, Biro Perekonomian dan Keuangan	Triwulan II	

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT / INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERUBAHAN		NASKAH AKADEMIS	PENJELASAN / KETERANGAN			
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10
23	Peraturan Daerah	Perseroan Terbatas Jaminan Kredit Daerah (Perseroan Daerah)	Penyesuaian Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah	√	-	UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	√	-	BPBUMD, Biro Perekonomian dan Keuangan	Triwulan II	
24	Peraturan Daerah	Pengelolaan Air Minum	Wewenang, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah, hak dan kewajiban masyarakat, pelaku usaha dan badan hukum, pengelolaan air bersih/ minum, perizinan, sanksi	√	-	UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	√	-	Dinas Sumber Daya Air	Triwulan II	
25	Peraturan Daerah	Pengelolaan Air Limbah Domestik	Pengaturan tentang sasaran, hak dan kewajiban masyarakat dan pemerintah daerah, penyelenggaraan SPALD, baku mutu, kerja sama dan kemitraan, data dan informasi, perizinan, tarif, pengembangan teknologi PALD, penanggulangan tanggap darurat, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, larangan, sanksi dan penyidikan	√	-	UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	√	-	Dinas Sumber Daya Air, Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup	Triwulan II	

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT / INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERUBAHAN		NASKAH AKADEMIS	PENJELASAN/ KETERANGAN			
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10
26	Peraturan Daerah	Rumah Susun Milik	Pembinaan, Perencanaan, Pembangunan, Penguasaan pemilikan, Pemanfaatan, Pengelolaan, Peningkatan Kualitas, Pengendalian, Kelembagaan, Tugas dan wewenang, Hak dan Kewajiban, Pendanaan/sistem pembiayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Rumah Susun Milik	√	-	UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	√	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Triwulan III	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KETUA,

H. PRASETIO EDI MARSUDI, SH